



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011 – 2012
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Dengan : Kepala BKKBN
Hari/tanggal : Kamis, 7 Juni 2012
Waktul : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Pembahasan RKA /KL dan RKP K/L 2013;
2. Penjelasan mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Pimpinan : Ir. Soepriyatno/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 31 orang anggota dari 51 Anggota, 1 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN dimulai pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI dapat menerima Pagu Indikatif BKKBN Tahun 2013 sebesar Rp 2.593.741.000.000 (*Dua Trilyun Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat*

- a. Alokasi anggaran BKKBN sesuai arah kebijakan, strategi dan prioritas program tahun 2013.
 - b. Perlu melakukan penyesuaian program di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 sesuai persetujuan alokasi anggaran sehingga efektif, tepat sasaran serta mendukung persiapan menyongsong BPJS Kesehatan Tahun 2014.
2. Komisi IX DPR-RI akan memperjuangkan Usulan Penambahan Anggaran RAPBN 2013 melalui kegiatan *New Initiative* tahap II sebesar Rp 150.070.000.000 (***Seratus Lima Puluh Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah***) pada Rapat Badan Anggaran yang akan datang.
 3. Komisi IX DPR RI menyetujui dukungan anggaran untuk remunerasi (tunjangan kinerja) pegawai BKKBN Tahun 2012 sebesar Rp 144.490.701.000 (***Seratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah***).
 4. Komisi IX DPR-RI mendesak BKKBN untuk memberikan perhatian khusus dan pembinaan kepada Petugas Advokasi KIE, Petugas Penyuluhan KB Desa, Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Sub Klinik Desa terutama di wilayah DTPK dan Galcitas.
 5. Komisi IX DPR-RI meminta BKKBN memberikan data tentang keberhasilan petugas lapangan keluarga berencana, penyediaan alat bantu, pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan program Keluarga Berencana serta serapan anggaran dari masing-masing program pada tiap Kabupaten/Kota, pemetaan penduduk tahun 2010-2012 dan memberikan perincian alokasi anggaran per unit pagu indikatif Tahun 2013, paling lambat hari Selasa tanggal 12 Juni 2012.
 6. Komisi IX DPR-RI melalui Badan Anggaran DPR RI akan memperjuangkan peruntukan Dana Alokasi Khusus BKKBN agar dapat digunakan untuk biaya operasional.

Rapat diakhiri pukul 13.30 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
WAKIL KETUA,



Ir. SOEPRİYATNO